

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WALANTAKAN KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA

*Jonathan Diando Kotambunan¹
Johny Lumolos²
Gustaf Undap³*

Abstrak

Esensi Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ialah peningkatan kualitas mutu-hidup masyarakat lewat pembangunan yang telah diaktualisasi di lapangan maupun program pola ketrampilan tanpa mengesampingkan aspirasi kebutuhan masyarakat untuk mengantarkan pada kemandirian. Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif meninjau hasil wawancara serta observasi yang di dekskripsi dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini dapat mengetahui sampai sejauh mana penatalaksanaan “Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa”. Hasil tinjauan di lapangan menyimpulkan bahwa kompleksitas problematika yang ada, diantara sebagai berikut : Pemerintah Desa Walantakan belum mengupayakan proses penyadaran dalam pembentukan perilaku masyarakat masih bersifat apatis maupun meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek pembangunan, faktual di lapangan menunjukkan tindakan transformasi sebagai perwujudan pilar kualitas tatanan mutu-hidup dari individu ataupun masyarakat untuk tercapai kesejahteraan belum demikian akibatnya terhambat aktivitas roda perekonomian lewat pembukaan sejumlah unit Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui jalan pemukiman masih bersifat buntu serta rerumpunan pohon besar bisa mengancam korban jiwa maupun dalam serangkaian aksi pembangunan berasaskan suara murni aspirasi masyarakat, demikian halnya tidak ada aktualisasi Pemerintah Desa Walantakan mengenai maksimalisasi kemampuan intelektual lewat konversi aksi tindakan nyata berupa bantuan dan pelatihan maupun pengembangan keterampilan bagi masyarakat petani dan kelompok tani.

Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pembangunan desa pada dasarnya memegang peranan penting dalam sinerginya terhadap pembangunan daerah dan nasional, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa, pembangunan desa juga dapat diharapkan untuk menekankan angka urbanisasi dari desa ke kota. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 mengemukakan proses pembangunan desa dimulai dari menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, kemudian dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa serta sebagai landasan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, masyarakat diikut sertakan dalam mengambil perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan cara memberikan atau menuangkan pemikiran yang merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maupun sampai proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa demikian juga pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.

Hakekat pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanfaatkan secara maksimal segala potensi sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan sampai pada pelaksanaannya. Pembangunan dapat menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Strategi pembangunan berpusat pada rakyat memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh

masyarakat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku.

Desa Walantakan, sebagai lokasi penelitian Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yang terdapat pada pasal 6 ayat 5 Bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa pelatihan usaha pertanian bagi petani ataupun kelompok tani yang ada di Desa Walantakan masih kurang mendapat sentuhan tangan dari pemerintah desa seperti peralatan pertanian dan penyuluhan teknologi pertanian serta pula akses permodalan usaha tani dapat dikatakan tidak ada, sehingga para masyarakat yang menjadi petani sebagai mata pencaharian utama namun kini berubah menjadi suatu pekerjaan sampingan dan beralih profesi menjadi tukang ojek sebagai mata pencaharian utama yang tentunya berpenghasilan tidak menentu dibandingkan menjalani profesi sebagai petani dalam mata pencaharian utama, ini disebabkan pemerintah desa hanya mengutus atau perwakilan dari kelompok tani untuk mengikuti pelatihan usaha pertanian tingkat kecamatan, hal ini mengakibatkan informasi yang disampaikan dari utusan dari kelompok tani yang mengikuti pelatihan tidak akurat secara spesifik terhadap seluruh petani dan kelompok tani yang ada dan hasilnya mayoritas para petani mengelolah lahan pertanian secara mandiri serta beralih ke profesi lain yang lebih menguntungkan.

Sebenarnya dengan adanya pemberdayaan masyarakat bagi kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membentuk dan mengubah perilaku

masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Namun disisi lain jalan menuju areal pertanian serta jaringan irigasi sudah menunjukkan baik, berkat dari pemerintah desa dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan suatu perwujudan peningkatan kualitas hidup bagi para petani.

Desa Walantakan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, yang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pemukiman dengan menilik pada Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, salah satunya jalan pemukiman. Di Desa Walantakan sendiri masih ada jalan pemukiman yang belum dibenahi secara maksimal, dimana jalan pemukiman tersebut sudah ada pemukiman rumah warga namun kondisi yang ada saat ini di lapangan masih banyak ditemukan pohon-pohon besar maupun rumpun pohon bambu besar menyelimuti pemukiman rumah warga dan sewaktu-waktu bisa menimbulkan korban jiwa diakibatkan tumbangnya pohon tersebut, serta jalan pemukiman tidak terpelihara dan buntu, jika pemerintah membenahi jalan pemukiman mungkin masyarakat yang tinggal di area jalan pemukiman tersebut bisa diberdayakan dengan membuka sejumlah unit Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan suatu langkah menunjukkan pembangunan menitik beratkan pada rakyat sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, maka upaya pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Selain itu meningkatkan

ekonomi, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga akan meningkatkan partisipasi mereka terhadap pemeliharaan hasil pembangunan yang ada.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam pembangunan desa yaitu masyarakat sering tidak mengikuti musyawarah desa dan aktif dalam setiap organisasi kemasyarakatan, sehingga masyarakat tidak mengetahui sejauh mana dan melakukan apa dalam proses perkembangan pembangunan desa dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, hal inilah yang justru menjadi persoalan kegagalan implementasi dimana pemerintah desa kurang melakukan komunikasi seperti melakukan sosialisasi langsung dengan memberikan informasi kepada masyarakat, disposisi yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam mengimplementasi tujuan atau sasaran, juga implmentor kurang mengasa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang masih rendah dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Desa Walantakan dapat melakukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat lewat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui tahap-tahap pemberdayaan, antara lain:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi keberlangsungannya proses pemberdayaan yang efektif, ini dibuktikan sikap apatis dari

masyarakat desa dalam mengambil bagian di berbagai kegiatan yang salah satunya gotong royong kerja bakti yang dilakukan oleh pemerintah desa, disebabkan sebagian masyarakat Desa Walantakan merupakan masyarakat pendatang yang memiliki sikap individualisme perwujudan ciri kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga sebagian masyarakat desa yang mau melakukan kegiatan gotong-royong dalam pembuatan sarana dan prasarana desa harus sistem pemberian upah kerja tidak secara swadaya atau sukarela,

2. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan-keterampilan dapat berlangsung baik, semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa menjadi tuntutan kebutuhan dari masyarakat. Hal tersebut tidak tercemin di Desa Walantakan sebab ketidakpuasan masyarakat atas kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah desa sebagai penerjemah kebijakan dari suatu peraturan perundang-undangan ke dalam aksi program pembangunan, ini dapat dilihat adanya jalan pemukiman yang belum dibenahi secara maksimal, disebabkan tidak adanya pemanfaatan dan pemeliharaan jalan pemukiman tersebut sudah ada pemukiman rumah warga namun fakta yang kini di lapangan masih banyak pohon-pohon besar maupun rumpun pohon bambu besar serta jalan tersebut buntu, karena langkah dari pemerintah desa tidak mengambil tindakan tegas terhadap penebangan pohon-pohon besar yang menyelimuti rumah warga sehingga mengakibatkan nantinya

menimbulkan korban jiwa atas tumbangnya pohon-pohon tersebut, serta kurang adanya dialog dari para pemerintah desa dan masyarakat untuk membebaskan lahan untuk dijadikan jalan pemukiman yang pada hakikatnya untuk kesejahteraan bagi masyarakat lewat dari membuka sejumlah unit Usaha Kecil Menengah (UKM), dan kurang cakap dalam tugas administrasi desa yang dilaksanakan sekretaris desa serta selalu diambil alih langsung dari kepala desa ini yang mengakibatkan pada tidak berjalan efektif proses pemerintahan desa, dikarenakan sekretaris desa dan kepala desa memiliki hubungan kekeluargaan,

3. Tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya untuk mengantarkan pada kemandirian. Situasi dan kondisi yang terjadi di Desa Walantakan belum menunjukkan maksimalisasi dari tahap ini, dibuktikan tidak adanya pemberian pelatihan usaha tentang pertanian bagi petani dan kelompok tani dari pemerintah desa untuk mengembangkan potensi hasil pertanian yang ada, pemerintah desa hanya mengutus atau perwakilan dari kelompok tani untuk mengikuti pelatihan usaha pertanian tingkat kecamatan, hal ini mengakibatkan informasi yang disampaikan dari utusan dari kelompok tani yang mengikuti pelatihan tidak akurat secara spesifik terhadap seluruh petani dan kelompok tani yang ada dan hasilnya mayoritas para petani

mengelola lahan pertanian secara mandiri serta beralih ke profesi lain yang lebih menguntungkan.

Oleh karena itu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi pendukung atas penyelenggaraan pembangunan.

Tinjauan Pustaka

Konsep implementasi itu dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory), maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (Stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki, Wahab (2016:132-133).

Implementasi menurut teori Jones dalam Mulyadi (2016:45) : "Those Activities directed toward putting a program into effect" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Van Horn dan Meter dalam Mulyadi (2016:45): "Those actions by publik and private individual (or group) that are the achievement or objectives set forth in prior policy" (tindakan yang dilakukan oleh pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang

dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.

Sementara itu Abdul Wahab dalam Tahir (2014:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah : Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Ini berarti bahwa setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada action intervention itu sendiri menurut Naihasy dalam Tahir (2014:55). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengambilan kebijakan. Van Horn dalam Tahir (2014:55) mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang digariskan dalam kebijakan.

Lebih lanjut Abidin dalam Tahir (2014:57) menjelaskan bahwa implementasi pada umumnya cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah (apa yang dilaksanakan adalah apa yang telah diputuskan). Selain itu Abidin juga menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan struktural,
2. Pendekatan prosedural,
3. Pendekatan kejiwaan, dan
4. Pendekatan politik.

Selain itu masalah lain yang sering muncul sehingga implementasi sering hambatan, yaitu dalam proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan, akibatnya adalah adanya kesenjangan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan, Tahir (2014:60).

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Metode Penelitian

Desain dan metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan mengandalkan analisa dan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah ataupun fenomena yang ada pada saat

penelitian dilakukan pada masalah bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang di selidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencenderaan lukisan, deskriptif juga menyinggung tentang fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu sistematis, faktual dan teliti.

Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari ucapan, tulisan ataupun perilaku orang-orang yang diamati dari peneliti sebagai instrumen kunci sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Yang menjadi Fokus dalam penelitian ini adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dan objek penelitian yang dilakukan, yaitu pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa dilihat dari Tahap-Tahap Pemberdayaan dalam Sulistiyani (2017:83) harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Pada penelitian ini hanya menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, tidak menggunakan populasi dan sampel karena bentuk penelitiannya merupakan deskriptif dengan analisa kualitatif sehingga untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara jelas, detail, akurat hanya bisa diperoleh melalui informan.

Ini sejalan dengan pernyataan dari McMillan & Schumacher dalam Agustinova (2015:10), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud, yaitu orang-orang memahami betul permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa, Kepala Seksi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kelompok Tani, Masyarakat Desa Walantakan Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa.

Hasil Penelitian

Esensi pemberdayaan masyarakat desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pernyataan ini sejalan dengan teori Riyadi dalam Theresia (2014:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengenai kepada ke suatu kesepakatan

bahwa : pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi terciptanyatingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Namun semua tidak bisa tercapai tanpa dilalui dengan implementasi dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (Stakeholders), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki, Wahab (2016:132-133).

Hakikat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat desa sendiri yaitu memperlihatkan hasilnya sebagai wujud nyata dari implementasi atau proses pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat dalam peningkatan taraf kehidupan, kini Pemerintahan Indonesia menerapkan suatu kebijakan pembangunan secara bottom up (pembangunan dari bawah) dengan menyesuaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, ini suatu kiat dari pemerintah untuk memperkokoh kedaulatan negara dengan mengedepankan desa sebagai garda depan negara.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan mulai observasi serta berbagai uraian yang disampaikan informan berdasarkan hasil wawancara terdapat unsur Pemerintah dan Perangkat Desa Walantakan maupun masyarakat Desa Walantakan mengenai "Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat". Maka peneliti akan membahas hasil penelitian

yang didapat peneliti selama berada di lapangan dengan mengacuh pada tahap-tahap pemberdayaan harus dilalui tersebut adalah meliputi :

Tahap Penyadaran Dan Pembentukan Perilaku Menuju Perilaku Sadar Dan Peduli Sehingga Merasa Membutuhkan Peningkatan Kapasitas Diri Pembangunan di tingkat desa, perlu diadakan model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan berpusat pada masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupan dengan keaktifan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menciptakan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta mengubah perilaku cara berpikir menuju kreatif dan inovatif untuk dapat mengekspansi maupun menginvasi pasar global yang dilaksanakan pemerintah desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada demi tercipta suatu pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah Desa Walantakan dalam menciptakan keterpaduan proses perencanaan pembangunan sampai penatalaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat sejalan yang mengandalkan asas gotong-royong secara swadaya dalam proses pembangunan di Desa Walantakan yang mengedepankan desentralisasi berdasarkan aspirasi dari kebutuhan masyarakat desa yang dikonversi dalam wujud karya nyata.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Walantakan, peneliti melihat Pemerintah Desa Walantakan belum secara maksimal melakukan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan yang berangkat dari aspirasi serta menjadi kebutuhan masyarakat

merupakan ikhtiar pemerintah desa namun hal menunjukkan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan tidak demikian.

Hasil tinjauan wawancara yang telah dilakukan terhadap infoman, transformasi atau proses perubahan perwujudan suatu tatanan kualitas mutu-hidup masyarakat memiliki kesinambungan dengan proses pembentukan perilaku secara sadar dan peduli untuk pencapaian untuk tujuan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya di Desa Walantakan yang menjadi persoalan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan, seperti dalam jalan pemukiman yang belum dibenahi secara maksimal, disebabkan tidak ada pemanfaatan dan pemeliharaan sehingga menghambatnya masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup lewat membuka sejumlah unit, Usaha Kecil Menengah (UKM) dilihat dari banyaknya pepohonan besar serta rumpunan pohon bambu besar maupun jalan tersebut buntu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan kurangnya keseriusan dari Pemerintah Desa Walantakan dalam upaya untuk memungkinkan potensi masyarakat berkembang diwujudkan oleh Pemerintah Desa Walantakan melalui pembangunan infrastruktur berupa jalan pemukiman yang belum dibenahi secara maksimal akibatnya relevansi antara harapan apa yang menjadi tuntutan dari kebutuhan dari masyarakat dengan realisasi di lapangan tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Jika tahapan sebelumnya telah terpenuhi maka akan berkesinambungan dengan tahapan ini dalam proses pencapaian tujuan pembangunan

berbasis pemberdayaan masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2017:83) Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.

Seperti yang diungkapkan Theresia (2014:5) Pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya, pembangunan harus benar-benar dimaksudkan untuk memperbaiki mutu-hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia (dan masyarakat) demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

Kesimpulan

Proses penyadaran dalam pembentukan perilaku yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Walantakan sebagai pucuk pimpinan belum nampak secara jernih terhadap masyarakat dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam serangkaian aksi kegiatan kemasyarakatan begitu apatis etiologinya yaitu setiap pembangunan yang dilaksanakan bukan murni berangkat dari landasan aspirasi kebutuhan masyarakat.

Transformasi sebagai perwujudan pilar kualitas tatanan mutu-hidup dari individu ataupun masyarakat namun pemerintah tidak menanggapi dalam mengilhami atas kicauan suara rakyat mengkonversi mengenai persoalan pemanfaatan dan pemeliharaan masih bersifat buntu dan banyaknya rerumpunan pohon dan bambu besar yang bisa menghambat alur maupun roda perekonomian lewat membuka sejumlah unit Usaha Kecil Menengah (UKM) bahkan bisa sampai menimbulkan korban jiwa akibat tumbangannya rerumpunan pepohonan tersebut.

Tidak adanya aktualisasi dari Pemerintah Desa Walantakan mengenai maksimalisasi kemampuan intelektual, lewat serangkaian aksi bantuan dan pelatihan maupun pengembangan keterampilan bagi masyarakat petani beserta kelompok petani dalam menciptakan kreasi dan inovatif dari inisiatif Pemerintah Desa Walantakan kepada masyarakat untuk mengantarkan pada kemandirian masyarakat.

Saran

Diharapkan Pemerintah Desa Walantakan agar menciptakan kondisi dan situasi yang kondusif mengenai tingkat animo/antusiasme dalam berpartisipasi segala proses pembangunan yang murni dan bening dari aspirasi kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa Walantakan dalam memanfaatkan sumber dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat berupa dana desa.

Rekonsialisasi diperlukan untuk proses peninjauan kembali atas dasar kebutuhan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Walantakan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kualitas tataran kehidupan masyarakat.

Pemerintah Desa kiranya dapat mengatur dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat untuk mengekspansi dan menginvasi pasar global lewat kecanggihan teknologi yang ada serta memfasilitasi sarana dan prasarana yang belum tersedia kiranya diperbaharui agar memantapkan hakekat arti suatu desa dalam mencapai tujuan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustinova, Danu Eko. 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik). Yogyakarta : Calpulus.

- Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung : Alfabeta.
- Gayo, HM Iwan. 2015. Buku Pintar Seri Politik (Almanak Negara). Jakarta : Penerbit Pustaka Warga Negara.
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik). Bandung : Alfabeta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga.
- Sujadi, Firman. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta : Penerbit Bee Media Pustaka
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta.
- Theresia, A. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik). Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Widodo, 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media.